

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak lama Timur tengah menjadi kawasan yang menarik bagi dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kawasan ini. Tiga keunggulan timur tengah, pertama dilihat dari letak geografisnya Timur Tengah berada pada posisi yang sangat strategis. Timur Tengah, selama berabad-abad telah diakui sebagai salah satu kawasan yang secara geografis paling strategis di dunia. Hal itu disebabkan karena Timur Tengah terletak diantara 3 benua, yaitu Eropa- Asia – Afrika. Selain itu Timur Tengah juga memiliki terusan Zues yang sejak lama telah dikenal sebagai jalur perdagangan internasional.

Kedua, faktor minyak. Timur Tengah merupakan tempat yang memiliki cadangan maupun produksi minyak terbesar, yaitu lebih dari 66% produksi dan cadangan minyak dunia. Padahal minyak adalah salah satu sumber energi utama masyarakat dunia di era modern ini. Karena kebutuhan energy minyak inilah, banyak negara-negara yang mengincar untuk menguasai lading minyak yang ada.

Ketiga, Timur tengah merupakan tempat Lahir 3 Agama Besar Dunia, yaitu Yahudi (Tembok Ratapan di Yerusalem bagian barat), Nasrani (Nazareth, Golgota) dan Islam (Makkah, Medinah, Masjidil Aqsa di Yerusalem bagian timur).¹

¹Sidik Istmita, "Jalilah timur tengah" slide 4

Sebagai kawasan yang terdiri dari negara-negara dengan bermacam-macam kultur dan memiliki peradaban tinggi, Timur Tengah rentan dengan konflik internal maupun konflik yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dalam bermasyarakat, masyarakat Arab terkenal sering terjadi konflik antar saudara, suku dll. Faktor eksternal konflik di Timur Tengah juga disebabkan adanya campur tangan atau intervensi dari pihak ketiga dalam setiap konflik internal yang terjadi di negara-negara Timur Tengah.

Dalam kurun waktu antara 2010 hingga 2013 lalu, terjadi konflik yang mulanya hanya konflik internal antar masyarakat dan pemerintah di negara-negara kawasan Timur Tengah. Namun konflik ini melebar hingga adanya campur tangan atau invansi dari negara-negara yang merasa memiliki kepentingan dalam konflik yang sedang berlangsung. Dengan dalih demokrasi dan kemanusiaan Amerika terlihat andil dalam setiap usaha masyarakat Timur Tengah dalam aksi untuk menuntut adanya revolusi dan pembaruan sistem yang diktator menjadi suatu sistem yang lebih demokratis. Gelombang demokrasi yang terjadi dikawasan Timur Tengah ini dikenal juga dengan istilah Arab Spring.

Arab Spring atau musim semi Arab merupakan suatu keadaan dimana terjadi pergolakan yang dilakukan masyarakat Arab untuk menuntut turunnya rezim penguasa yang diktator, pemerintahan yang korup. Tentu harapan yang diinginkan dari pergolakan yang dilancarkan adalah untuk mencapai suatu pembaharuan secara keseluruhan.

Musim semi Arab (*Arab spring*) merupakan suatu fenomena politik yang menarik untuk dikaji. Arab spring adalah suatu gerakan revolusioner yang

menentang dan menginginkan adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh. Revolusi yang menerpa kawasan Timur Tengah saat ini merupakan usaha untuk membentuk suatu negara yang lebih demokratis, dalam arti umum merupakan satu sistem dari rakyat untuk rakyat. Peristiwa Arab Spring ini pertama kali menerpa negara Tunisia yang kemudian disusul oleh negara-negara tetangganya yaitu Mesir, Libya dan Suriah.

Ketika angin perubahan telah dirasakan oleh negara-negara seperti Libya, Mesir, Tunisia, hal ini tidak dirasakan oleh negara Arab Saudi yang juga menganut sistem monarki atau dapat juga dikatakan tidak demokratis. Dalam hal ini posisi Arab Saudi yang notabennya bukan suatu negara demokrasi, diabaikan oleh Amerika. Sistem pemerintahan dan politik Arab Saudi tidak diubah menjadi sistem demokrasi sebagaimana negara-negara Arab lainnya. Sampai hari ini Arab Saudi tetap berdiri dengan sistem hirarkinya dimana Raja Abdullah menjadi pemimpin Saudi. Berbeda dengan negara-negara tetangganya seperti Mesir, Sudan, Libya yang habis disapu oleh Amerika.

Melihat apa yang terjadi dalam peristiwa Arab Spring ini, timbul pertanyaan publik mengenai hubungan Arab Saudi dan AS. Sesungguhnya hubungan Saudi dan Amerika telah terjalin sejak lama. Kedua negara ini telah melakukan kerjasama semenjak perusahaan minyak Aramco beroperasi di Arab pada 1930-an. Hingga hari ini Saudi-Amerika tetap melakukan hubungan kerjasama ini.

Saudi-Amerika menjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Kita ketahui bahwa Amerika merupakan negara industri yang

memerlukan supply minyak yang cukup besar dari Saudi. Begitupula Saudi, Saudi membutuhkan teknologi dan senjata-senjata dari Amerika untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Sehingga keduanya sulit untuk dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan demi berjalan dan tercapainya politik luar negeri masing-masing dari kedua negara ini.

B. Latar Belakang Masalah

Tiga tahun telah berlalu, ketika terjadi peristiwa besar yang mengubah tatanan pemerintahan dan perpolitikan di kawasan Arab. Fenomena yang mengguncang ini dikenal juga dengan istilah *Arab Spring* atau musim semi Arab. Arab Spring merupakan gelombang revolusi politik dan pemberontakan terhadap rezim yang berkuasa. Begitupula adanya usaha untuk membentuk negara yang demokratis, karena demokrasi dinilai merupakan suatu system ideal yang mampu menghindari terjadinya konflik antar satu sama lain, *democracies tend not to go to war with each other.*²

Pergolakan politik yang terjadi dikawasan Arab ini menerpa negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Bahrain, Suriah, Yaman, Libya, Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman, dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Gelombang demokrasi ini pertama kali terjadi di negara Tunisia pada akhir tahun 2010, dengan jatuhnya Ben Ali, penguasa Tunisia yang

²Kauppi, Viotti, Fourth Edition. International Relations Theory. Copy by Pearson Education, Inc. hal 139. Dalam Buku Michael W. Doyle, "Liberalism and World Politics," American Political Science Review, 80, 4 (1986): 1151-69. For a Survey of the literature, see Edward and Brian Pollins, "The Study of Interdependence and Conflict: Recent Advances, Open Questions, and Directions for Future Research," Journal of Conflict Resolution 45, 6 (2001): 834-59. Cf. Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle of Build Free Societies Throughout the World* (New York: Times Books-Henry Holt, 2008).

telah berkuasa selama 23 tahun yang dinilai korup dan tidak pro rakyat. Jatuhnya Ben Ali ini pun menyebabkan Ben Ali pergi keluar meninggalkan Tunisia untuk mendapatkan suaka politik ke pemerintahan Arab Saudi. Berhasilnya revolusi yang menumbangkan kepemimpinan Ben Ali di Tunisia menginspirasi masyarakat di negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya yang tidak lain juga dipimpin oleh rezim penguasa yang diktator dan yang tentunya tidak demokratis.

Hampir di setiap transformasi politik yang terjadi di beberapa negara di kawasan Arab tidak terlepas dari peran penting Amerika sebagai pemegang kendali atas pergolakan politik yang terjadi. Tumbangnya kepemimpinan presiden Hosni Mubarak, yang di paksa lengser dan yang kini sedang mengalami proses pengadilan di Kairo juga dimotori oleh peran penting Amerika. Amerika Serikat dituduh berada dibalik para demonstran Mesir. Tuduhan ini sangat beralasan, belakangan diketahui bahwa Amerika telah banyak menggelontorkan dana atas kudeta yang dilancarkan oleh pihak oposisi.

Diberitakan bahwa Amerika mendanai sebuah LSM yang didirikan oleh Omar Afifi Solaman melalui NED (*National Endowment for Democracy*). NED merupakan lembaga khusus yang didirikan untuk menyokong demokratisasi di Timur Tengah pasca peristiwa 11 September 2001 silam. Selain itu ada pula tokoh wanita yang diduga mendapatkan suntikan dana dari AS melalui NED, dia adalah Esraa Abdul Fatah. Wanita ini menjadi pilar pendanaan Partai Dustur yang dipimpin oleh Mohammed El-Baradei. Esraa mendapatkan dana dari NED melalui

LSM bernama Akademi Demokrasi Mesir yang ia dirikan di AS. Melalui LSM

tersebut ia menggalang dukungan kepada militer dan berusaha mempengaruhi media Barat agar tidak menyebut aksi demonstrasi di Mesir sebagai kudeta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi dan tumbangnya kepemimpinan diktator di beberapa negara Arab tidak terlepas dari dukungan kuat Amerika Serikat dan Barat (sekutu AS). Seperti perintah yang ditetapkan oleh presiden Barack Obama secara halus meminta agar presiden Hosni Mubarak mundur dan turun dari jabatan kepresidenannya. Selain itu presiden dari negara Paman Sam ini juga meminta hal serupa kepada presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh dan presiden Suriah Bashar al-Assad.³

Andil AS dalam tumbangnya pemerintahan Moeammar Khadafy tidak kalah besar. AS yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ikut serta dalam operasi militer di Libya dengan dalih perlindungan terhadap warga sipil di Libya. Selain itu militer NATO juga menekan pergerakan pasukan pemerintah Libya yang semakin agresif serta diberlakukannya zona larangan terbang bagi militer Libya. Akibatnya aksi saling serang ini telah banyak menelan korban baik dari pihak demonstran, dari pihak oposisi maupun dari warga sipil Libya.

Percikan api revolusi sampai juga pada masyarakat Saudi. Perlahan masyarakat unjuk rasa terhadap pemerintahan King Abdul Aziz. Protes dimulai pada 21 Januari oleh seorang pria berusia 65 tahun di Samtah, Jizan. Menyusul aksi protes yang dilakukan oleh ratusan orang di berbagai kota seperti di Jeddah, Qatif, al-Awamiyah, Riyadh, dan Hofuf. Protes juga dilakukan dengan

³ Obama Desak Mubarak Ambil Keputusan Tepat. Dikutip pada 18 September 2013. Dari <http://lha.apakindonesia/dunia/2011/02/110205-obama-desak-ambil-keputusan-tertentu>, dilatip pada September

menggunakan jejaring sosial facebook yang diprakarsai oleh Faisal Ahmed Abdul Ahad atau Abdul Ahadwas. Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh para buruh pada April 2011 di depan gedung kementerian pemerintah Riyadh, Thaif, dan Tabuk, mereka menuntut agar hak-hak buruh diperhatikan.

Tidak ketinggalan, perempuan Saudi juga menuntut untuk agar diberikan hak pilih. Perempuan-perempuan Saudi mengkampanyekan hak pilih perempuan di jejaring *facebook* yang disebut juga dengan “Baladi”. April 2011 perempuan di Jeddah, Riyadh dan Dammam mencoba untuk mendaftar sebagai pemilih untuk pemilu kota 29 September, meskipun elite politik Saudi telah menetapkan larangan terhadap perempuan dalam berpartisipasi di politik.

Tidak hanya itu perempuan juga menuntut agar perempuan di Arab Saudi diberikan izin mengemudi. Mereka melakukan protes dengan mengendarai kendaraan, sehingga pada bulan Mei 2011 Al-Sharif ditahan oleh polisi setempat. Hingga akhir Juni 2011 banyak kasus serupa yang terjadi, setidaknya 70 kasus serupa yang berhasil di dokumentasikan. Akhir September seorang perempuan bernama Shaima Jastania dihukum 10 cambukan karenamengemudi di Jeddah.

Aksi protes dan demonstrasi yang dilancarkan oleh masyarakat di Arab Saudi tidak berakhir sama seperti negara-negara Arab lainnya. Gelombang revolusi di Arab Saudi tidak mencapai klimaks yang berarti bagi masyarakat yang menginginkan pembaruan dalam sistem pemerintahan. Hingga hari ini Arab Saudi masih berdiri tegak dengan sistem pemerintahannya yang lama, yaitu sistem monarki yang jauh dari kata demokrasi

Seperti yang kita ketahui semenjak peristiwa WTC Amerika mengkampanyekan kebijakan luar negerinya yaitu "*War on Terror*". Dalam mengkampanyekan kebijakannya tersebut Amerika bekerjasama dengan Arab Saudi untuk menanggulangi ancaman terorisme internasional khususnya di kawasan Arab.

Melihat revolusi atau arab spring yang terjadi negara-negara Arab seperti Libya, Mesir, Suriah, Tunisia, Amerika sebagai negara penjunjung tinggi demokrasi dan HAM sangat antusias untuk memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan negara demokrasi di negara-negara tersebut. Bahkan dalam berbagai kesempatan Amerika mengintervensi suatu negara dan mendanai kelompok oposisi seperti yang diberikan kepada aktivis Mesir. Namun melihat kasus Arab Saudi, Amerika seolah-olah tidak memperdulikan atau bahkan enggan untuk mengupayakan berdirinya sistem demokrasi di Arab Saudi, padahal di Arab Saudi tercatat banyak sekali kasus pelanggaran HAM. Hal inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah.

C. Rumusan Masalah

"Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Amerika Serikat enggan melakukan demokratisasi terhadap Arab Saudi dalam Peristiwa Arab Spring?"

D. Kerangka Berpikir

Untuk menganalisa isu yang diangkat, penulis mengkaitkan dua konsep yaitu konsep politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional

a. Konsep Politik Luar Negeri

Foregin Policy atau kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan spesifik yang ditunangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁵

Pada dasarnya, politik luar negeri merupakan *action theory* atau kebijakan suatu negara yang dibuat untuk negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Setiap politik luar negeri dirancang untuk mencapai tujuan nasional.⁶ Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.⁷

Langkah utama dalam proses pembuatan kebijaksanaan politik luar negeri mencakup:

- a. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
- b. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;

⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5.

⁶ Yanyan Mochamad Yani. *Politik Luar Negeri.hlm 1*. Dikutip pada tanggal 05 April 2014, dari <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/50129/> dalam Bruce Russett dan Harvey Starr. 1988. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co., hal. 190-193.

⁷ Mochamad Yani. 2014. *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:

- c. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;
- d. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- f. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Tiga kriteria untuk mengkalsifikasikan tujuan-tujuan dari politik luar negeri suatu negara menurut K.J Holsti, yaitu:

- a. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan
- b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middleterm*), dan jangka panjang (*long-term*).
- c. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.⁸

Tujuan mendasar serta faktor paling utama yang menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Politik luar negeri berhubungan erat dengan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara menentukan bagaimana kebijakan luar negeri diambil dalam rangka mencapai tujuan dari kepentingan nasional itu sendiri.

⁸ Yayan Mochtar Yani.Op, cit. hlm 6. Dalam Bruce Russet dan Harvey Starr. 1988. *World Politics: The Many Faces of Choice*, 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co. hal. 190-193

b. Konsep Kepentingan Nasional

Secara sederhana, kepentingan nasional dapat dipahami sebagai suatu muatan yang sangat umum dan merupakan suatu tujuan yang terus-menerus untuk diperoleh oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dalam dinamika politik global. Sedangkan konsep kepentingan nasional yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh Jack. C Plano dan Roy Olton dalam buku *The International Relations Dictionary* dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (*decision makers*) suatu negara dalam menentukan politik luar negeri. Para penganut paham realis menyamakan kepentingan nasional sebagai suatu upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas negara lainnya. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat dilakukan melalui teknik paksaan (*koersif*), atau kerjasama (*cooperation*). Karena itu pula, sering kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk tetap bertahan hidup (*survival life*) dalam politik internasional.⁹

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah :

"The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs".¹⁰

⁹ Mengkaji Kepentingan Amerika Serikat. Dikutip pada tanggal 11 Januari 2014. Dari <http://deenge.blogspot.com/2012/06/mengkaji-kepentingan-amerika-serikat.html>

¹⁰ Judul Skripsi Hubungan Internasional. Dikutip pada tanggal 11 Januari 2014. Dari http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-hubungan-internasional_5815.html

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku inter-nasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami perilaku politik luar negeri suatu negara, di mana negara-negara selalu bertindak untuk tujuan kepentingan nasional. Morgenthau mengatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara.¹¹ Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara-negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut antara lain kesejahteraan ekonomi.¹²

Jack dan Roy juga memencamtumkan idenya tentang kepentingan nasional menjadi 5 elemen penting dalam kepentingan nasional:

- a. Pertahanan diri (*self preservations*), yaitu kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- b. Kemandirian (*independence*), yaitu kemerdekaan dan tidak dijajah oleh negara lain.
- c. Integritas territorial (*territorial integrity*), yaitu kepentingan untuk menjaga keutuhan wilayah territorial, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam.

¹¹ Mohtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm 146

- d. Keamanan militer (*military security*), kepentingan untuk menjaga keamanan militer wilayah dari berbagai ancaman.
- e. Kemakmuran ekonomi (*economic well-being*)¹³, merupakan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, eksistensi dan pemasaran produk baik kerjasama secara bilateral maupun regional.

Maka dari 5 elemen tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional harus dapat memenuhi kebutuhan Negara dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan dalam ataupun luar negara tersebut.

Kepentingan nasional terkait erat dengan muatan nilai-nilai sosial suatu negara yang meliputi kebutuhan (*need*), kepentingan (*interest*) dan aspirasi (*wants*).¹⁴ Oleh sebab itu kepentingan nasional harus memiliki tiga unsur yang harus di penuhi seperti yang tertera.

Aktualisasi kepentingan nasional suatu negara itu sangat tergantung dari pemimpin politiknya saat itu. Artinya bahwa ke mana arah kebijakan politik luar negerinya guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut, sering didominasi oleh keputusan yang diambil oleh sang pemimpin negaranya. Dengan kata lain peran *decision maker* (pengambil keputusan) dalam pengambilan keputusan sangat menentukan sejauh mana tercapainya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Di sini perlu kebijakan dan jeli dalam merumuskan arah politik luar

¹³ Teori-Teori Ilmu Hubungan Internasional . Dikutip pada tanggal 7 Januari 2014. Dari <http://ibnusyafii.wordpress.com/category/ilmu/hubungan-internasional/teori-teori/> dalam Plano , Jack C. and Rowelton. International Relations Dictionary. USA. 1967

negeri yang harus disesuaikan juga dengan dinamika politik global sehingga selalu bisa memiliki peluang untuk bisa menggapai kepentingan nasionalnya.¹⁵

Sedangkan Hans J. Morgenthau berpendapat tentang kepentingan nasional bahwa “kepentingan suatu Negara mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bias membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Hubungan kekuasaan ataupun pengendalian ini bisa diciptakan melalui cara paksaan maupun kerjasama antar negara.¹⁶

Melihat hubungan kerjasama Arab Saudi- Amerika dapat dilihat kepentingan kedua belah pihak adalah mencakup dalam dua hal yaitu:

a. Kepentingan Ekonomi (Upaya untuk melindungi Aset Amerika)

Berlandaskan pada kemakmuran ekonomi nasionalnya, Amerika hingga saat ini masih bekerja sama dengan baik terhadap Arab Saudi. Karena jika hubungan Amerika Arab Saudi memanas, bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap perekonomian AS.

Sebagai negara dengan industri besar, AS sangat memerlukan minyak Arab Saudi untuk mengoperasikan industri-industrinya. Karena hingga era modern seperti ini belum di temukan energy alternative untuk menjalankan industri-industri. Sehingga tidak heran minyak masih dijadikan sebagai energy utama untuk menopang pengoperasian perindustrian.

b. Menaggulangi masalah Terorisme

Selain karena faktor kepentingan ekonomi, alasan AS enggan melakukan demokratisasi terhadap Arab Saudi yaitu dikarenakan oleh adanya kepentingan

¹⁵ Ibid, hlm 1.

¹⁶ Hans J. Morgenthau, politik antar bangsa, Yayasan ebor Indonesia, Jakarta, 1990

keamanan militer (*military security*). Sejak lama AS dan Saudi menjalin kerjasama militer dan keamanan. Terlebih semenjak terjadinya peristiwa 11 September 2001 lalu. Dimana keamanan dunia diancam oleh keberadaan kelompok atau organisasi yang tidak sejalan dengan kebijakan yang di terapkan oleh Amerika.

Selain itu, Arab Saudi juga bekerjasama dengan Amerika untuk menjaga keamanan wilayahnya serta menjaga eksistensi penguasa kerajaan. Lihat saja ketika AS menempatkan pasukan keamanannya di Saudi. Di ketahui bahwa AS seringkali memberikan bantuan terhadap Arab Saudi baik itu berupa penyediaan peralatan militer maupun bantuan lainnya.

E. Hipotesa

Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis, hipotesa penulis terhadap rumusan masalah yang diteliti yaitu “Faktor-faktor yang Menyebabkan Amerika Serikat Enggan Melakukan Demokratisasi Terhadap Arab Saudi dalam Peristiwa Arab Spring” adalah karena dua faktor penting yaitu:

- a. Upaya untung melindungi aset-aset Amerika di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi terdapat anak perusahaan Amerika yang tentunya memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian nasional Amerika.
- b. Menaggulangi masalah Terorisme. Dalam hal ini, terorisme merupakan ancaman bagi Amerika, oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar Amerika dan Arab Saudi untuk meminimalisir pertumbuhan teroris

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah dengan cara studi pustaka (*Library Research*). Dengan artian bahwa penulis memanfaatkan berbagai sumber yang bersifat sekunder. Seperti surat kabar, media social, buku-buku, majalah, internet, dll yang menunjang dan memberikan informasi-informasi yang relevan, sesuai, sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Amerika tidak menerapkan system demokrasi terhadap Arab Saudi dalam peristiwa Arab Spring. Selain itu tujuan penelitian juga untuk mengetahui hubungan Amerika-Arab yang sebenarnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagi penulis sendiri manfaat penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai konflik yang sesungguhnya, dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antar Amerika-Arab. Selain itu manfaat bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam menempuh program Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Bagi Akademisi diharapkan penulisan ini dapat menambah bahan bacaan, literature pengetahuan mengenai hubungan Arab Amerika dalam dunia

- c. Bagi praktisi, semoga tulisan ini dapat menjadi referensi dalam membuat sebuah kebijakan dalam hubungan luar negeri antar negara.

H. Batasan dan Jangkauan Penelitian

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, penulis menerapkan batasan terhadap bahasan yang dikaji, baik itu tempat dan waktu. Jangkauan Waktu penelitian adalah semenjak revolusi Tunisia pada awal 2011 lalu hingga pertengahan 2013.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, konsep, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini akan membahas lebih jauh mengenai Arab Spring, hubungan antara Arab Saudi dan Amerika.

BAB III: Bab III ini akan membahas mengenai kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Arab Saudi dan alasan Amerika tidak menerapkan system demokrasi terhadap Arab Saudi.

BAB IV: Berikutnya dalam bab IV, penulis akan membahas mengenai faktor apa saja yang menjadikan Arab Saudi lolos dalam peristiwa Arab Spring.

BAB II

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Di dalam bab II ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan Arab Saudi sebagai sekutunya di Timur Tengah. Serta akan dijelaskan aktualisasi dari kebijakan luar negeri yang telah dibentuk.

A. Prinsip-prinsip Politik Amerika Serikat di Timur Tengah

Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang secara geografis sangat strategis. Bagaimana tidak, kawasan ini berada tepat diantara tiga benua besar yaitu Eropa, Afrika dan Asia.¹⁷ Selain terletak pada poros yang strategis, Timur Tengah juga dianugrahi dengan kekayaan dari dalam perut buminya. Dan dikatakan bahwa Timur Tengah berada tepat di jantung dunia "*old world*"¹⁸, posisi ini dinyatakan bahwa merupakan pusat sistem dunia. Tidak heran bila kawasan ini menjadi "primadona" bagi banyak negara.

Hampir 70 % cadangan minyak dunia berada dikawasan ini. Lima besar negara penghasil minyak adalah Saudi dengan cadangan 230 milyar barel, Irak dengan cadangan 170 milyar barel, UEA, Kuwait, dan Venezuela. 4 negara Arab sudah dikuasai Amerika yang berarti menguasai 56% minyak dunia.

¹⁷ Agus N. Cahyo, *Tokoh-tokoh Timur Tengah yang Diam-diam Jadi Antek Amerika dan Sekutunya*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 32.

¹⁸ Lihat di Geopolitik dan Geostrategi Amerika Serikat: Hagemoni Dunia dalam nurlaili-laksmi-w-fisip 11.web.unair.ac.id diakses pada tanggal 18 Desember 2013. *Old World* adalah sebuah tatanan

Selain karena minyak, eksistensi Israel¹⁹ yang merupakan saudara kandung Amerika juga memiliki peran penting. Karena Israel merupakan pintu utama terhadap tercapainya kepentingan AS. Sejumlah agenda terselubung sudah lama dimiliki dan dijalankan Amerika di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, AS juga berkepentingan dalam membendung berkembangnya gerakan Islam radikal dan menciptakan umat Islam yang pro-Barat.²⁰

Presiden AS Jimmy Carter lewat *Doctrin Carter* menegaskan bahwa "*Persia Gulf an are of "vital interest" to United States, Which World, if necessary, be defended military*"²¹ Strategi suatu negara ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan nasionalnya. Dalam doktrin Carter, dinyatakan bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang penting bagi Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat berkisar pada²²:

- a. Mengusahakan agar sumber-sumber alam Timur Tengah tidak jatuh ketangan musuh.
- b. Menjamin tersalurnya sumber-sumber alam penting bagi industri dan militer Amerika Serikat bersama sekutunya.
- c. Menjaga mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha AS.
- d. Menjaga kredibilitas dengan memenuhi komitmen Amerika Serikat di Timur Tengah
- e. Meneruskan hak transit dan *over flight* bagi pesawat dan kapal laut

¹⁹ Lihat di *Amerika Serikat dan Domino Demokrasi di Timur Tengah* dalam blogs.unpad.ac.id dikutip pada tanggal 2 Desember 2013.

²⁰ Agus N. Cahyo *Op, Cit* hlm. 14.

²¹ Sidik Jatmika. AS Penghambat Demokrasi (Yogyakarta: Bigraf,2000), hlm. 137. Dalam Elizabeth J. Gamlen, "*United States Strategic Policy Toward the Middle East : Central Command*" dalam *Keberhasilan "Kebijakan" dalam Hubungan Amir Abmedi* on site p.212

- f. Menjaga eksistensi penguasa-penguasa Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika Serikat
- g. Mempertahankan diri dari ancaman-ancaman kelompok yang membahayakan dominasi Amerika Serikat dan persekutuan barat di Timur Tengah.

Pasca perang dunia II berakhir, Amerika digadang-gadangkan sebagai pemimpin dunia baru. Sebagai pemimpin dunia, keberadaan Timur Tengah sebagai suatu kawasan di dunia tidak luput dari perhatian dan kontrol Amerika. Bagi AS keberlanjutan kepemimpinan AS dalam politik dunia sudah menjadi keharusan/takdir (*Continued US Leadership in world politics is taken a given*). Menurut Hastedt prinsip dasar dari politik luar negeri AS dalam mengelola sistem internasional adalah menerima keberagaman sistim politik di dunia namun secara fundamental harus cocok/sesuai (*compatible*) dengan nilai-nilai tradisional AS yang antara lain demokrasi dan kebebasan individu.²³

Sebagai negara *super power*, kebijakan politik luar negeri AS mengalami gejolak-gejolak yang menarik untuk di pahami. Amerika berperan penting dalam setiap konflik yang terjadi di beberapa negara yang kaya akan minyak. Propaganda Amerika menyebabkan negara-negara ini saling mencurigai antar satu sama lain. Amerika senantiasa mendukung negara-negara pro Barat.

Keterlibatan Amerika dalam setiap konflik di Timur Tengah sebenarnya tidak lain karena tuntutan ideologi yang mereka usung, yaitu demokrasi. Sebagai

²³ Lihat di *Amerika Serikat dan Timur Tengah*. Dikutip pada tanggal 02 Desember 2013. Dalam http://www.alumnipii.org/2013/05/22/amerika_serikat_dan_timur_tengah dalam Glen P. Hastedt *Leadership in American Foreign Policy: Past, Present and Future*, 1988. Dikutip pada tanggal

negara besar, AS menganggap dirinya sebagai negara paling demokratis di dunia, dia adalah *champion of democracy*²⁴ yang menyuarakan liberal kapitalis²⁵ serta membendung ideologi-ideologi sosial radikal.²⁶ Dengan ini, barang tentu Amerika merasa memiliki kepentingan untuk menyebarkan ideologi yang mereka anut serta menekan perkembangan ideologi-ideologi serta gerakan-gerakan yang bertentangan dengan ideologi dasar yang mereka anut. Amerika menerapkan sistem liberal dalam mempermudah pengaruh mereka di internasional termasuk di Timur Tengah.

Peristiwa 11/09 setidaknya telah memecahkan konsentrasi AS dalam menetapkan kebijakan politik luar negerinya. Peristiwa runtuhnya gedung *World Trade Centre* ini mengubah arah kebijakan politik luar negeri Amerika, kepemimpinan presiden Bush meyerukan kepada seluruh dunia bahwa perang terhadap terorisme²⁷ telah dimulai. Karena terorisme dianggap aktor yang paling bertanggung jawab atas serangan terhadap WTC. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menangkap para terorisme dari seluruh penjuru dunia dan mengadili mereka.

Terorisme dalam pandangan Amerika adalah orang atau kelompok tertentu atau suatu negara yang menentang kebijakan politik luar negeri AS dan menghambat AS dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, sehingga

²⁴ Lihat di *Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah* dalam sinar-hitam.blogspot.com diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

²⁵ Liberal kapitalis adalah system ekonomi yang asset-aset produksinya sebagian besar dimiliki oleh sector individu atau swasta, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

²⁶ Sosialis Radikal adalah sebutan lain dari komunisme.

²⁷ Kebijakan Anti Terorisme Amerika Serikat. Diakses pada tanggal 2 Desember 2013. Dari

kelompok tersebut harus ditumpas.²⁸ Sebagai negara yang menguasai dunia, mudah bagi AS untuk menyebarkan hegemoni mengenai isu terorisme.

Sebagai negara yang mengembangkan isu baru ini, AS tampil paling terdepan sebagai polisi dunia.²⁹ Hal ini pulalah yang memudahkan AS terlibat dalam setiap konflik internal suatu negara. Karena tugas dari polisi dunia ini sendiri adalah menjaga keamanan dunia.

Terkadang dalam menjalankan politik luar negerinya AS terlihat tidak konsisten. Di ketahui bahwa AS selalu menerapkan demokrasi standar ganda.³⁰ AS akan mendukung aksi diktatorisme meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), asalkan pemerintahan diktator ini dapat memberikan keuntungan bagi AS dan mempermudah AS dalam mencapai tujuan PLN AS, dalam hal ini sebut saja Arab Saudi sebagai sekutu AS yang sejak lama dikenal sebagai partner AS di Timur Tengah.

Namun AS juga memanfaatkan isu demokrasi dan HAM dalam menjatuhkan atau menekan lawan yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Sebut saja Libya yang habis-habisan diserang AS dengan dalih pelanggaran hak sipil yang dilakukan oleh pemerintahan setempat pada masa Arab Spring. Rezim Khadafi hanyalah sebagian kecil rezim yang akhirnya digulingkan oleh pemerintah Amerika.

²⁸ www.asafiril.com, *Op.Cit.*

²⁹ Agus N. Cahyo, *Op.Cit.*, hal. 38

³⁰ Lihat di *Contoh-contoh Politik AS di Timur Tengah*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2012

Sebenarnya ada beberapa faktor kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, salah satunya yaitu kepentingan politik seperti yang di jelaskan di atas. Berikut yaitu kepentingan ekonomi yang telah disinggung sekilas bahwa telah sejak lama kawasan Timur Tengah diketahui memiliki cadangan minyak bumi yang sangat besar. Minyak inilah yang sering menjadi andalan negara-negara kawasan Timur Tengah dalam menjalankan politik luar negerinya.

Secara ekonomi sebenarnya minyak menjadi sebuah komoditas yang mempengaruhi lobi terhadap negara-negara dengan industri dan teknologi yang maju. Amerika beserta sekutunya membutuhkan limpahan minyak dari Timur Tengah. Begitupula sebaliknya, negara-negara Timur Tengah sejak dulu sudah terkenal dengan negara-negara yang rentan akan konflik, baik itu konflik antar suku, kelompok maupun konflik antar kelompok dan pemerintah sehingga memaksakan mereka untuk membeli alat dan senjata militer demi mempertahankan keutuhan wilayah negaranya. Semenjak 1970 hingga 1981 AS melalui *Military Industrial Complex* (MIC)³¹ menjadi pengeksport senjata di berbagai negara di kawasan Timur Tengah khususnya.

Selain itu keberadaan Israel sebagai adik kandung AS di Timur Tengah mengharuskan AS untuk mempertimbangkan kepentingan antar keduanya, dalam hal ini AS harus menjaga eksistensi Israel. Dalam rumusan kebijakan anti terorisme Amerika Serikat, terdapat sebuah program yaitu *Project for New American Century* (PNAC).³² Program ini muncul tahun 1997 untuk menciptakan

³¹ Ibid

³² www.asafiril.com, *Op, Cit.* PNAC dicetuskan oleh kelompok *Hawkish*, sebuah kelompok kecil di luar negeri AS yang sangat dekat dengan George W. Bush dan memiliki pengaruh besar di

hegemoni baru Amerika Serikat dan Israel, membangun negara Israel damai, mengganti para pemimpin Timur Tengah dengan mereka yang pro AS-Israel, mencari sumber energi besar dan menguasainya, serta mengembangkan persenjataan.

Selain itu juga terdapat lobi Yahudi dalam pemerintahan AS. Lobi ini mengantarkan AS dalam perumusan politik luar negerinya yang menganut "*Israel first*", yaitu doktrin yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan politik luar negeri AS harus selalu menguntungkan pihak Israel. Dalam konteks di wilayah Timur Tengah, hal ini menegaskan bahwa AS harus membendung munculnya kelompok atau negara-negara lain di Timur Tengah yang nantinya akan membahayakan Israel serta menjaga Israel sebagai negara dengan kekuatan militer besar di wilayah ini.

Ada beberapa kepentingan yang ingin dicapai dalam kebijakan luar negeri yang di terapkan Amerika terhadap kawasan Timur Tengah:³³

- a. Untuk mengontrol dan menguasai cadangan minyak bumi dan gas yang ada dikawasan ini.
- b. Untuk mengontrol dan mengawasi rezim tertentu di Timur Tengah seperti rezim Saud (Arab Saudi), Israel, Mesir, Iran dan Pakistan.
- c. Untuk membendung penyebaran ideologi komunis dan gerakan-gerakan separatis yang dapat menghambat perkembangan demokrasi di Timur Tengah.
- d. Menjamin eksistensi saudara kandungnya yaitu Israel di Timur Tengah

B. Aktualisasi Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah

Dalam setiap kepemimpinan negara adidaya ini terdapat corak politik luar negeri yang dibuat oleh para pembuat kebijakan dala mewarnai kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Terutama pada masa pemerintahan dua presiden berpengaruh Amerika, yaitu George Walker Bush dari partai Republik dan Barack Obama dari partai Demokrat. Terlihat sekali perbedaan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh masing-masing presiden ini. Semisal Bush yang cenderung menggunakan *hard diplomacy* sedangkan Obama cenderung menggunakan *soft diplomacy*.³⁴

a. Masa Kepemimpinan George Walker Bush

Bentuk *hard diplomacy* yang dijalankan oleh Bush pada saat itu sebenarnya tidak terlepas dari kondisi dunia pada saat itu, terlebih pasca tragedi WTC. Dimasa presiden Bush ini juga mendeklarasikan isu baru yang mengancam perdamaian dunia, yaitu terorisme "*War on Terror*". Karena teroris di anggap aktor dibalik runtuhnya *world trade centre*. Kampanye melawa terorisme global sekarang merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri dan pertahanan dan tujuan-tujuan internasional lainnya berada di bawah tujuan ini. Dari kampanye yang diserukan ini ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Dimasa Bush, Amerika disibukkan dengan agenda-agenda penangkapan serta pemusnahan jaringan terorisme internasional. Aktualisasi kebijakan yang

³⁴ Ha Widiyanto, *Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Negara-Negara Islam Pada Masa Pemerintahan George Walker Bush Dan Barack Obama*, dalam

dibuat oleh pemerintahan Bush adalah dengan menginvasi Afghanistan. Karena diindikasikan bahwa pangkal terorisme berada dinegara ini. Serangan itu dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan Taliban karena telah menampung Osama Bin Laden yang dituduh bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 di Amerika, dan menghancurkan kamp-kamp al-Qaeda di Afghanistan.

Serangan dilakukan dengan sangat bengis dan kejam, pada 7 Oktober 2001, persis sebulan setelah serangan 11 September itu, pesawat-pesawat AS menjatuhkan puluhan rudal jelajah dan bom-bom yang dikendalikan laser ke sasaran-sasaran strategis di Kabul dan kota-kota lain Afghanistan. Serangan itu diikuti dengan satu operasi di darat yang mengalahkan gerilyawan Taliban hanya dalam beberapa pekan. Taliban kemudian melarikan diri ke tempat-tempat persembunyian di Afghanistan dan Pakistan selama beberapa tahun tidak melakukan aktivitas, a Tujuan jangka pendeknya yaitu, pertama melenyapkan al-Qaeda, sehingga Bush menyerang Afghanistan, karena disinyalir bahwa pimpinan Taliban yaitu Osama Bin Laden bersembunyi disana. Namun lagi-lagi dugaan pemerintahan Bush ini meleset sama seperti ketika invansinya terhadap Irak pada 2003 silam. Kemudian sasaran kedua yaitu mengganti pemerintahan Taliban, baik untuk mencegah al-Qaeda untuk mendapatkan perlindungan ataupun untuk menenjukka kepada negara lain tindakan apa yang akan di terima jika memberikan perlindungan ataupun bantuan terhadap al-Qaeda.

Berikut sasaran jangka panjangnya adalah memastikan agar tidak

pencapaian tujuan politik internasionalnya. Untuk meraih tujuan ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus memusatkan perhatian pada:

1. Pengaturan koalisi antiteroris
2. Meningkatkan pengawasan atas senjata pemusnah massal
3. Membangun kembali Afganistan
4. Membangun kembali hubungan dengan negara-negara Arab dan Islam.³⁵
5. Kiblat invasi pasukan pimpinan AS itu.³⁶

Selain invasi terhadap Afghanistan, Amerika juga menginvasi Irak yang pada saat itu disinyalir memiliki senjata pembunuh massal berbahan nuklir, biologi dan kimia (nubika) serta rudal balistik (weapons of mass destruction/ WMD). Invasi ini dilakukan untuk melucuti senjata pemusnah masal Irak dan menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap membahayakan stabilitas global dan regional. Invasi ini disebut juga sebagai operasi pembebasan Irak (Operation Iraqi Freedom).

Dengan ini pemerintah AS berhasil mempengaruhi PBB untuk mengeluarkan resolusi dan mengirim Tim Inspeksi Senjata PBB yaitu UNSCOM (*United Nations Special Commision*) ke Irak. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan lagi Resolusi 1441 mengenai perlucutan senjata destruksi atau pemusnah massal Irak dan pembentukan Tim Inspeksi yang diberi nama UNMOVIC (*United Nations Monitoring, Verification, and Inspection*

³⁵ Samuel P. Huntington, George W. Bush, Francis Fukuyama, Fareed Zakaria, Robert D. Kaplan, Dani Rodrik, *Amerika dan Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Hlm. 378, 379.

³⁶ 10 Tahun Invasi ke Afghanistan di Peringati. Dikutip pada tanggal 05 April 2014. Dari <http://internasional.kompas.com/read/2014/10/07/1243110010.TahunInvasiASkeAfghanistan>

Commision). Resolusi ini menyatakan bahwa Irak harus menyerahkan laporan mengenai senjata pemusnah massal, sistem, dan program pengembangannya.

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak.³⁷

Menurut data yang didapat dari Paris (an-najah.net),³⁸ setidaknya 116.000 warga sipil Irak dan lebih dari 4.800 tentara koalisi tewas sejak meletusnya perang Irak tahun 2003 sampai penarikan pasukan Amerika Serikat tahun 2011. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Irak ini sangat dahsyat dan memakan banyak korban baik itu dari pihak militer atau bahkan masyarakat sipil.

Perang Bush melawan Irak ini membuat ekonomi AS melemah, karena mayoritas dari anggaran belanja negara terserap untuk membiayai Perang Irak. Pada kurun waktu beberapa tahun kebijakn luar negeri AS masih berkuat pada isu tentang alat pembunuh massal. AS sangat konsen dalam hal ini. Hal ini jugalah yang membuat DK PBB mengeluarkan Resolusi 1747 DK PBB, memberikan sanksi kepada Iran atas program pengadaan nuklir.

Sampai dengan akhir periode kepemimpinan Bush pemerintah Amerika Serikat sebagai pemimpin pasukan multinasional (koalisi) gagal dalam

³⁷ Abdul Halim Mahally. 2003. *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 330.

³⁸ Warga Sipil Tewas Selama Agresi AS ke Irak. Dikutip pada tanggal 21 Desember 2013. Dari <http://www.an-najah.net/berita/116-000-warga-sipil-tewas-selama-agresi-as-ke-irak/>

membuktikan keterkaitan Irak dengan jaringan terorisme internasional dan kepemilikan senjata pemusnah masal.³⁹

b. Masa Pemerintahan Barack Obama

Pergantian kepemimpinan antar Bush dan Obama memiliki perubahan yang sangat signifikan, terlebih dalam pola kebijakan luar negerinya. Pada masa kepemimpinan Obama pola kebijakan luar negeri Amerika lebih mengutamakan jalan-jalan halus hamper dalam setiap masalah atau *soft diplomacy*.

Pergeseran pola kebijakan luar negeri ternyata tidak lepas dari isu yang harus dihadapi kedua pemimpin. Jika Bush didominasi oleh isu stabilitas keamanan, kepemimpinan Obama didominasi oleh pemulihan citra dan popularitas Amerika Serikat yang terpuruk. Realisasi *soft diplomacy* yang dijalankan Obama antara lain melalui pelibatan aktor-aktor non-pemerintah, pendekatan-pendekatan yang bersifat normatif, kunjungan kenegaraan dan forum-forum pembicaraan terhadap negara-negara Islam yang semakin intensif dan lain-lainnya.

Barack Obama menanggapi partisipasinya dalam invasi ke Irak dan Afghanistan tahun 2003 juga menjalankan pendekatan-pendekatan secara komprehensif dan proporsional. Transformasi kepemimpinan di Amerika Serikat tidak memungkinkan untuk merubah kebijakan luar negeri secara cepat dan reaksioner. Menanggapi hal ini Barack Obama lebih memprioritaskan keberadaannya pasukan multinasional sebagai bagian dari *peacebuilding*, yaitu

pendekatan perdamaian melalui pembangunan wilayah pasca konflik baik di Irak ataupun Afghanistan. Hal yang sama juga berlaku bagi kasus Guantanamo.

Pada akhirnya dimulai pada akhir 2010 lalu, AS memanfaatkan momen penting Arab Spring untuk melanjutkan cita-citanya agar mendirikan negara-negara dengan sistem demokrasi. AS dibawah kepemimpinan Obama membantu masyarakat di beberapa negara untuk mewujudkan negara dengan sistem demokrasi, seperti Mesir, Libya, Suriah dll.

Tabel 2.1

Kebijakan Luar Negeri AS Pasca Tragedi World Trade Centre Hingga 2008

Tahun	Kebijakan Luar Negeri	Hasil
2001	Agresi ke Afghanistan pasca serangan 9/11. Dengan tujuan untuk menangkap Osama Bin Laden.	Gagal. AS tidak berhasil menangkap Osama bin Laden.
2003	Agresi ke Irak, untuk menjatuhkan Saddam Hussein dan mencari WMD (<i>weapons of mass destruction</i>)	Saddam berhasil digulingkan dan dikenai hukuman melalui pengadilan hibrid. Tetapi hingga saat ini WMD tidak pernah ditemukan
2007	Resolusi 1747 DK PBB, memberikan sanksi kepada Iran atas program pengayaan nuklir	PBB memberikan sanksi, tetapi program nuklir Iran tetap berjalan. Ahmadinejad tetap berseberangan dengan AS.
2008	Konferensi Annapolis untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.	Gagal. Kesepakatan untuk menyelesaikan konflik sebelum tahun 2009 tidak terwujud.

C. Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Arab Saudi

Semenjak sekian lama hubungan AS dan Arab Saudi terbilang sangat “romantis” dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa Arab Saudi merupakan kunci utama keberhasilan dan tercapainya kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah secara umum. Kerjasama pertama yaitu masuknya perusahaan minyak dari California untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh Saudi pada tahun 1938 yaitu perusahaan Aramco. Kerjasama ini mengalami perkembangan, hingga saat ini Saudi membutuhkan peralatan militer dari AS untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayah kekuasaannya.

Meskipun dalam perjalanan hubungan AS- Saudi ini kadang terdapat batu ganjalan yang sesaat membuat hubungan ini memanas. Pada masa kepemimpinan Raja Faisail, Saudi dengan lantangnya mengembargo AS beserta sekutu-sekutunya yang berkebutuhan sama. Yang hal ini membuat AS beserta sekutunya kebingungan. Oleh sebab itu minyak merupakan komoditi utama Saudi dalam lobi hubungannya dengan AS. Minyak menjadi tawar menar yang cukup efektif dalam perpolitikan Saudi. Pertamakali AS dan Saudi melakukan kerjasama yaitu ketika ditemukannya ladang minyak di sekitar wilayah Arab Saudi.

Dalam konteks kerjasama terorisme paska dikumandangkannya “*war on terror*” hubungan keduanya kembali memanas. Pasca-era serangan 11 September 2001 tersebut, dimana faktor islam menimbulkan permasalahan serius terhadap politik luar negeri Arab Saudi karena ditemukan bukti-bukti keterlibatan orang

Arab Saudi dalam peristiwa tersebut membuat jurang pemisah antara hubungan antara Arab Saudi dan AS menganga lebar.⁴⁰

Hingga pada 2010 silam ketika negara-negara Timur Tengah terguncang dengan isu demokrasi Arab Saudi sempat merasa khawatir dengan adanya manuver dari masyarakat Saudi. Arab Saudi sangat mengkhawatirkan ketika sewaktu-waktu massa yang terorganisir dapat menumbangkan kerajaan Saud. Namun hingga saat isu Arab Spring ini perlahan terpendam, tidak ada bentuk-bentuk akan terjadinya tumbangnya rezim Saud. Meskipun sebenarnya pernah ada usaha rakyat Saudi untuk menumbangkan dinasti Saud ini. Mengapa usaha rakyat Saudi ini tidak berujung pada jatuhnya rezim Abdullah? Salah satunya karena tidak adanya dukungan dari pemerintahan Washington. Pemerintahan Washington dalam kasus Arab Saudi seolah-olah buta dan terkesan tidak peduli terhadap apa yang dicita-citakan oleh rakyat Saudi. Hal ini berbalik dengan kenyataan yang terjadi di Mesir, Libya, Iran, Irak. Dan hal inilah yang sering disebut dengan politik muka dua.⁴¹

Demokrasi terkadang menjadi isu yang sangat mematisikan bagi sebagian negara dengan sistem diktator. Sebut saja negara tetangga Arab Saudi seperti Mesir, Suriah, Libya. Namun bagi Arab Saudi hal ini tidak berlaku, AS seakan acuh tak acuh terhadap sistem yang di anut oleh pemerintahan Riyadh. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan diberbagai pihak, mengenai alasan apa yang melatarbelakangi Amerika untuk bersikap acuh terhadap kasus di Arab Saudi.

⁴⁰ Bambang Cipto, MA. 2011. Dunia Islam Dan Masa Depan Hubungan Internasional Di Abad 21: "Diplomasi Global Arab Saudi". (Yogyakarta. LP3M UGM), hlm. 193-194.

⁴¹ Politik muka dua Amerika Serikat bisa dikatakan juga sebagai politik standar ganda Amerika Serikat di Timur Tengah. Yaitu politik oportunist yang mengungkapkan dua hal yang berlainan,

Bagi AS sistem yang dianut oleh Saudi bukanlah masalah besar asalkan kebutuhan dan keuntungan akan terus menyertai pemerintahan Washington. Sebernarnya hal ini tidaklah mengejutkan bagi dunia internasional, karena hubungan AS dan Saudi bukanlah sekedar hubungan teman biasa.

Berikut beberapa pernyataan penting petinggi-petinggi AS terhadap Arab Saudi:⁴²

Peter de la Billiere, seorang komandan UK dalam Perang Teluk pertama, secara eksplisit menjelaskan pentingnya mempertahankan para diktator itu tetap memegang kekuasaan di dunia Muslim. Dia berbicara mengenai kebutuhan untuk menjaga rezim Saudi:

“Sebagaimana kita, Inggris, telah mendukung sistem kekuasaan syeikh semenjak perginya kita dari Teluk di awal 1970-an, dan melihatnya berkembang, kita suka jika itu harus berlanjut. Arab Saudi adalah teman lama dan terbukti kita ... Maka sangatlah menjadi kepentingan kita bahwa negara dan rezim itu tetap stabil setelah perang.”

Ini bukanlah kejutan karena pada 1958 Komite Intelijen Gabungan Inggris (UK Joint Intelligence Committee) mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan kepentingan-kepentingan kita di negerinegeri Teluk Persia adalah bergantung pada berlanjutnya kestabilan di area itu. Saat ini hanya para penguasa yang bisa menyediakan ini. Tidak ada rezim alternatif yang tampak, tentunya bukan rezim-rezim yang bisa memberikan stabilitas yang kepadanya pemeliharaan berbagai kepentingan Inggris bergantung. Satu kegagalan mendukung siapapun dari para Penguasa itu akan melemahkan kepercayaan yang lain terhadap kemampuan dan kemauan kita untuk melindungi mereka. Adalah dalam keyakinan ini bahwa posisi spesial kita di Teluk dengan mantap berpijak.”

Sumber: Nationalist and radical movements in the Arabian Peninsula, 10 February 1958, Public Record Office, CAB 158/31.

⁴² Oleh Hizb ut-Tahrir Inggris di terjemahkan oleh Annas. I Wibowo (Mendukung Para Diktator dan Tirani “metode Umum Kebijakan Luar Negeri Barat”) dalam <http://www.hizb.org.uk> info: OlehHizb@hizb.org.uk Dikembangkan dan Terjemah [PDF]

Demikian juga, Dewan Keamanan Nasional AS (*US National Security Council*) menulis bahwa:

“bagi USA kepentingan-kepentingan ekonomi dan budaya dalam area itu telah menyebabkan secara alami dekatnya hubungan-hubungan AS dengan berbagai elemen dunia Arab yang kepentingan utamanya bergantung pada pemeliharaan hubungan-hubungan dengan Barat dan status quo di negeri-negeri mereka”.

Melalui dukungan mereka pada para diktator dunia Muslim, para pemerintah Barat adalah sekutu dalam menghasilkan kematian ribuan orang yang dibunuh dan disiksa karena mengusahakan pemerintahan Islam, sekutu dalam menolak suara politik para Muslim di negeri Muslim manapun dan sekutu dengan para penguasa dunia Muslim dalam memiskinkan massa dengan mengekang seluruh negeri-negeri di bawah utang IMF dan memberi korporasi-korporasi kebebasan tangan untuk mengeksploitasi massa. Sejauh hingga 1957, Kantor Luar Negeri Inggris (*British Foreign Office*) mengidentifikasi bahayanya para penguasa Muslim kehilangan kekuasaan mereka kepada para reformis atau gerakan-gerakan